



**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2018**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PATI**  
**NOMOR 37 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA OPD)**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5

1.4 Sistematika Penulisan ..... 5

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 8**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 8

2.2. Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 14

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan..... 17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 27

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 30**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 30

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati Pati ..... 31

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ..... 35

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 48

3.5 Isu-isu Strategis Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 54

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... 57**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 57

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 59**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 61**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 75**

**BAB VIII P E N U T U P..... 77**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 15

Tabel 2.2 Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan ..... 16

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 ..... 19

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Pati ..... 23

Tabel 2.5 Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas  
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ..... 25

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Pati ..... 30

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan  
Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan  
Wakil Bupati Pati ..... 33

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Pati Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah  
Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta Renstra Dinas  
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ..... 47

Tabel 3.4 Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan  
dan Perikanan Kabupaten Pati ..... 55

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan  
dan Perikanan Kabupaten Pati ..... 58

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..... 59

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati ..... 62

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ..... 75

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan  
lain ..... 3

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  
Pati ..... 9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengaruh arus globalisasi yang makin meluas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta karakteristik sumberdaya kelautan dan perikanan, akan berakibat pula pada pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Pati. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dan harus mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, khususnya sumberdaya perikanan laut yang pada yang hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Sumberdaya perikanan laut tropis memiliki banyak spesies yang relatif terbatas jumlahnya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Kabupaten Pati memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri-dari sumberdaya perairan pantai sepanjang  $\pm$  60 Km dengan lebar 4 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut, sumberdaya perikanan air payau berupa tambak seluas  $\pm$  10.329 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir dan sumberdaya perikanan air tawar yang semakin berkembang.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut merupakan modal dasar pengembangan yang menjadi tumpuan harapan masyarakat dan menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu : (1) secara ekonomi mampu memberikan keuntungan bagi seluruh pelaku ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, (2) secara sosial memberikan jaminan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, (3) secara ekologi terpeliharanya kelestarian sumberdaya dan daya dukung lingkungan dan (4) secara politik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bagi penguatan kesatuan dan persatuan bangsa.

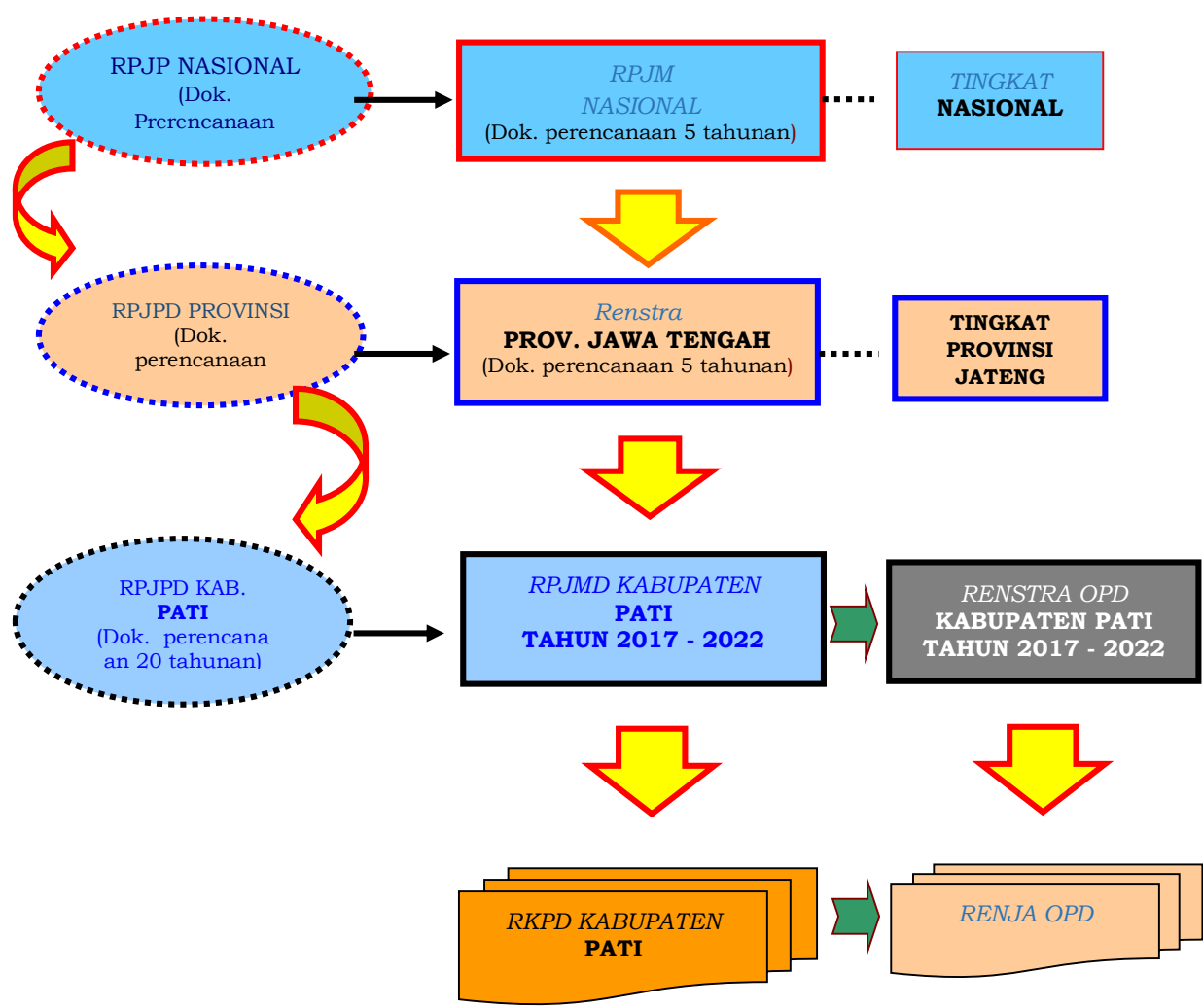
Sejauh ini pembangunan kelautan dan perikanan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan namun belum optimal dan masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus segera dicari pemecahannya. Untuk itu pembangunan kelautan dan perikanan di masa datang memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat yang diimplementasikan dalam program dan kebijakan-kebijakan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pati di bidang kelautan dan perikanan dan disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Kementrian dan Kelautan Perikanan sehingga akan terjadi kesesuaian rencana pembangunan di setiap tingkatan, khususnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (Lima) Tahunan, merupakan pejabaran teknis atas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Pati.



Gambar 1.1      Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain.



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun mengacu pada sejumlah peraturan-perundangan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain meliputi :

1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten pati Tahun 2018 Nomor 1 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan

- Pemerintahan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pati;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
  17. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok fungsi dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan skala prioritas serta alat bantu untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada akhir tahun dalam lima tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap, jelas dan utuh, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan beserta struktur organisasinya, sumber daya Dinas Kelautan dan Perikanan, gambaran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun ke depan.

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

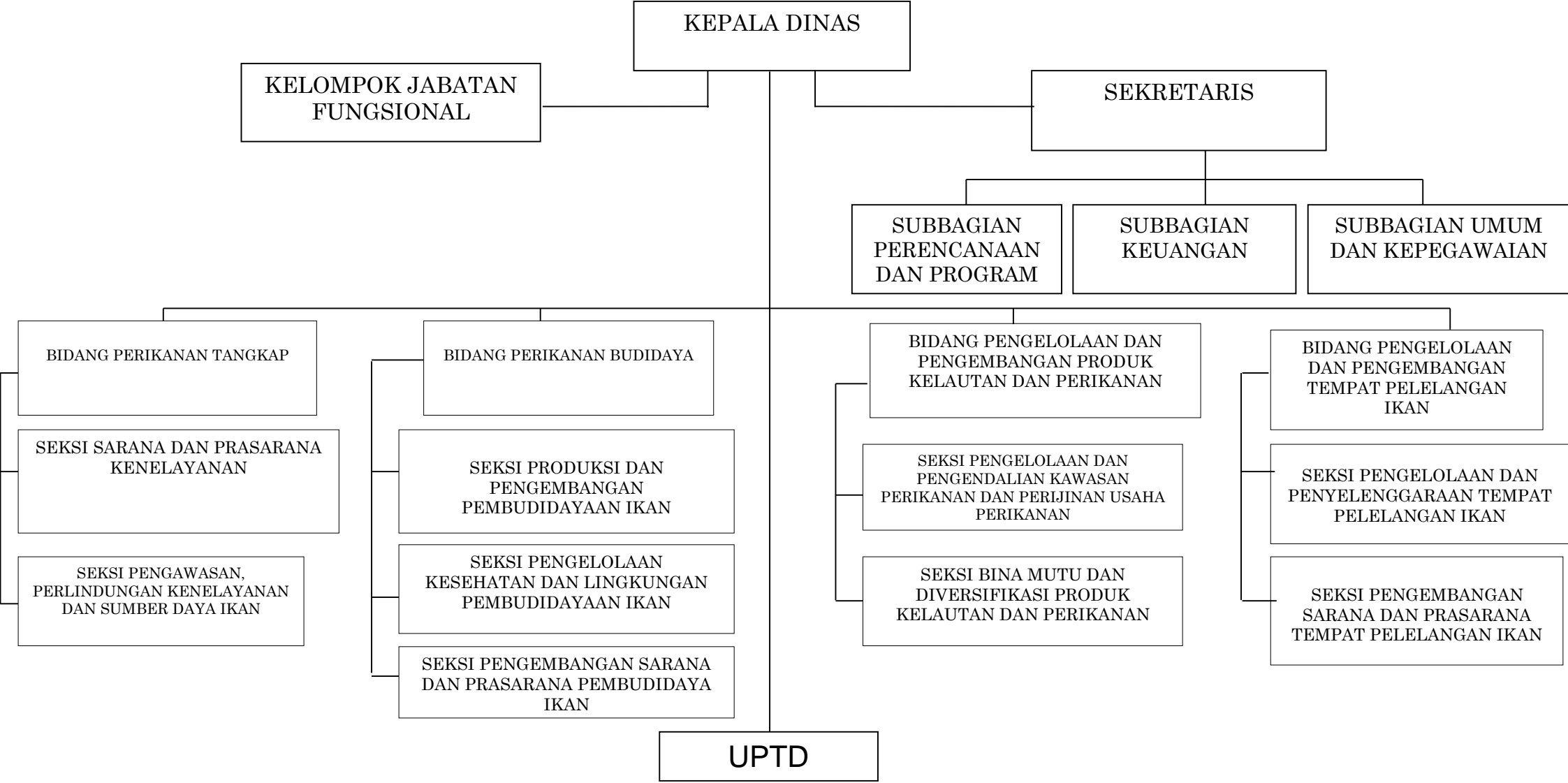
b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati



### **Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Subbag Perencanaan dan Program;
  2. Subbag Keuangan;
  3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap
  1. Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
  2. Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya
  1. Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
  2. Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
  3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
  1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
  2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
  1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Pelelangan Ikan;
  2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan.



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; dan
- i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

#### B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) subbagian, yaitu subbagian Perencanaan dan Program; subbagian Keuangan; dan subbagian Umum Dan Kepegawaian.

#### C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Kenelayanan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kenelayanan Serta Pengawasan Perlindungan Kenelayanan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;

Bidang Tangkap membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kenelayanan dan Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan.

#### D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, produksi dan usaha perikanan budidaya, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan, Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan dan Perijinan Usaha Perikanan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan dan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pemasaran dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

G. Kelompok jabatan fungsional

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

## **2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan**

Berdasarkan data bulan Desember tahun 2016, dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 62 personel, terdiri atas 44 orang laki-laki dan 18 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 62 orang, terdiri dari :

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Pejabat Struktural | : 19 orang |
| 2. Fungsional Umum    | : 39 orang |
| 3. Fungsional Khusus  | : 4 orang  |

Jumlah PNS menurut golongan

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Golongan I   | : - orang  |
| 2. Golongan II  | : 23 orang |
| 3. Golongan III | : 31 orang |
| 4. Golongan IV  | : 8 orang  |

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. SD             | : 1 orang  |
| 2. SLTP           | : 0 orang  |
| 3. SLTA           | : 27 orang |
| 4. Sarjana Muda:  | 2 orang    |
| 5. Sarjana        | : 22 orang |
| 6. Pasca Sarjana: | 10 orang   |

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS (Pegawai Pusat) : 18 orang

Jumlah PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) Tenaga Kontrak Pusat : 14 orang.

Jumlah tenaga kontrak dan harian lepas : 139 orang (123 orang tersebar di 8 TPI)

Selain sumber daya manusia sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll)

dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	Mobil dinas	9	Baik
2	Sepeda motor dinas	55	Baik
3	Traktor	4	Baik
4	Genset	4	Baik
5	Pompa Air	13	Baik
6	Excavator/ Bego	2	Baik
7	Kapal pemadam kebakaran	1	Baik
8	Alat2 laboratorium	33	Baik
9	Mesin ketik manual	4	Baik
10	Almari	79	Baik
11	Meja	215	Baik
12	Kursi	486	Baik
13	Filling kabinet	30	Baik
14	Tabung pemadam	7	Baik
15	Timbangan	12	Baik
16	Lemari es	4	Baik
17	Freezer	1	Baik
18	Komputer/ PC	28	Baik
19	Laptop	51	Baik
20	Printer	55	Baik
21	AC	24	Baik
22	LCD proyektor	3	Baik
23	Kamera digital	5	Baik
24	Handycam	3	Baik
25	Wireless	3	Baik
26	Sound system	6	Baik
27	Televisi	4	Baik
28	Mesin finger print	1	Baik
29	Mesin potong rumput	2	Baik
30	Rak Arsip	8	Baik

**Tabel 2.2.**  
**Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Ket
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.479	817	
2	TPI Juwana Unit I	6.463	2.325	
3	TPI Juwana Unit II	40.000	3.680	
4	TPI Banyutowo	2.351	2.351	
5	TPI Puncel	420	214	
6	TPI Sambiroto	506	132	
7	TPI Margomulyo	271	84	
8	TPI Pecangaan	300	275	
9	TPI Alasdowo	120	72	
10	BBI Brati	14.180	639	
11	BBI Sukolilo	11.000	107,75	
12	BBI Tlogowungu	19.789	178	
13	Tambak Dinas Margomulyo	4.500	36	Bangunan gudang
14	Tambak Dinas Dororejo	4.100	81	Bangunan Handling splis
15	Laboratorium POSIKANDU	-	54	Berada di lahan tambak dinas Dororejo

**Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan**

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 km
- Luas Tambak Garam : 2.838.111 Ha
- Produksi Garam Th. 2015 : 381.704 Ton
- Luas Potensi Mangrove : 8.906.352 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 173.2 Ha
- Terumbu Karang Buatan
  - Muara Sungai Juwana : 450 m<sup>2</sup>
  - Pantai Desa Lengkong : 450m<sup>2</sup>
  - Muara Sungai Juwana : 450m<sup>2</sup>
- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m<sup>2</sup>
- Kelompok Pembudidaya Garam

- Jumlah Kelompok PUGAR : 976 kelompok
- Jumlah Kecamatan : 4 kec.
- Jumlah Desa : 20 desa
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)
  - Berbadan Hukum : 130 KUB
    - KUB BH Kemenkumham : 5 KUB
    - KUB BH Notaris : 30 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pencapaian target

kinerja selama periode 2012 – 2017 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.3****Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2012-2017**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi perikanan																		
	a. Perikanan tangkap (Ton)		44,637		41,239	42,063	42,904	43,762	44,637	28,954	16,143	26,710	27,782	26,734	0.70	0.38	0.62	0.63	0.60
	b. Perikanan budidaya (Ton)		43,350		37,035	42,200	42,250	42,300	43,350	34,060	28,597	39,195	42,036	42,510	0.92	0.68	0.93	0.99	0.98
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)		40		33.17	34.82	36.56	38.39	40.31	23.53	24.36	28.95	25.94	26.76	0.71	0.70	0.79	0.68	0.66
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)		83		75	76	76	79	83	100	100	125	131	131	1.33	1.32	1.64	1.66	1.58
4	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok)		110		110	110	110	110	110	276	276	373	373	375	2.51	2.51	3.39	3.39	3.41
5	Rata-rata pendapatan nelayan (ribuan rupiah/ bulan)		4,000		2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	3,000	3,500	1,608	2,230	2,500	1.50	1.40	0.54	0.64	0.63
6	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (ribuan rupiah/ bulan)		3,500		2,000	2,250	2,500	3,000	3,500	2,450	2,500	2,795	2,950	3,000	1.23	1.11	1.12	0.98	0.86

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)		74		60	63	66	70	74	614	792	778	693	775	10.23	12.57	11.79	9.90	10.47
8	Luas kawasan mangrove (ha)		221		151	166	183	201	221	NA	230	173	190	173	NA	NA	0.95	0.94	0.78
9	Luas abrasi yang tertangani (ha)		227		155	170	187	206	227	NA	230	42.38	39	54	NA	NA	0.23	0.19	0.24

Capaian kinerja selama kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2012-2017 berdasarkan target yang telah ditetapkan secara umum menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan walaupun sebagian besar belum melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada tahun berkenaan, antara lain cuaca yaitu curah hujan dan gelombang laut yang mempengaruhi produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap cenderung menurun. Sektor Perikanan Laut sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem (terutama di tahun 2014), kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST), naik turunnya harga bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Perubahan iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim. Keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, juga mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan karena sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati masih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut. Alat tangkap jenis ini yang banyak digunakan oleh Nelayan Kabupaten Pati adalah cantrang dan bundes. Produksi perikanan budidaya terutama produksi perikanan tambak dari tahun 2013 – 2017 mengalami kenaikan produksi sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan produksi disebabkan adanya bencana banjir yang melanda 7 kecamatan wilayah pesisir di Kabupaten Pati. Akibat adanya bencana banjir tersebut, para petambak mengalami gagal panen yang berdampak pada penurunan produksi tambak. Untuk luasan eksisting mangrove dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun demikian, di tahun 2017 luasan eksisting

mangrove berkurang sebesar 8,75% menjadi 173,2 Ha. Penurunan luasan mangrove ini disebabkan oleh pengrusakan mangrove yang dilakukan masyarakat yang akan membuka lahan untuk dijadikan tambak dan juga oleh abrasi. Menurut data disebutkan kerusakan parah berada di 4 desa di Kecamatan Tayu yaitu Desa Kalikalong, Desa Sambiroto, Desa Keboromo, Desa Dororejo dan 3 Desa di Kecamatan Dukuhseti yaitu Desa Kembang, Desa Tegalombo dan Desa Puncel. Untuk mengatasi pengrusakan mangrove oleh masyarakat di Kabupaten Pati perlu dilakukan penegakan perda secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan di wilayah sabuk hijau.

Ada beberapa faktor internal penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati periode Tahun 2013-2017 antara lain adalah :

1. Keterbatasan SDM perangkat daerah baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah.
3. Belum tersedianya sistem pembinaan dan pengawasan berbasis sistem informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan.
4. Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka untuk sinergitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
5. Belum efektifnya perencanaan program dan kegiatan khususnya dalam menentukan indikator kinerja yang dapat menunjukkan fokus dan lokus (sasaran) secara lebih tepat.
6. Jumlah anggaran tiap tahun yang belum sebanding dengan beban tugas yang diemban oleh perangkat daerah.

Berikut Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 secara lengkap yang menggambarkan perkembangan jumlah anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

**Tabel 2.4****Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

No	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	152,000	214,000	175,500	236,000	193,000	50,000	51,000	60,000	74,210	25,000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	145,000	159,000	189,000	198,000	235,000	150,000	145,000	402,500	296,715	55,000
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-

No	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	-	500,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-
5	Pengembangan Budidaya Perikanan	288,000	8,012,000	9,480,250	10,803,000	12,464,000	192,650	435,377	32,034,435	1,026,140	867,000
6	Pengembangan Perikanan Tangkap	19,974,000	19,985,000	23,527,500	29,095,000	34,325,000	5,179,023	2,732,500	3,736,000	1,042,695	7,430,020
7	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	118,000	80,000	85,000	30,000	30,000	33,158	121,400	20,000	37,840	15,000
8	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2,485,000	4,020,000	4,930,000	5,690,500	3,765,000	2,318,070	3,900,799	78,240,271	3,358,400	2,605,098
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	1,505,000	1,755,000	2,292,500	1,800,000	1,932,500	481,546	637,000	438,000	671,320	1,572,154

**Tabel 2.5**

**Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	40.79	-17.99	34.47	-18.22	2.00	17.65	23.68	-66.31	6.15	-15.91
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	9.66	18.87	4.76	18.69	-3.33	177.59	-26.28	-81.46	12.83	-22.18
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	0	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pengembangan Budidaya Perikanan	2681.94	18.33	13.95	15.38	125.99	7257.86	-96.80	-15.51	156.49	45.65

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengembangan Perikanan Tangkap	0.06	17.73	23.66	17.98	-47.24	36.72	-72.09	612.58	14.49	9.44
7	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	-32.20	6.25	-64.71	0.00	266.13	-83.53	89.20	-60.36	-28.99	-17.99
8	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	61.77	22.64	15.43	-33.84	68.28	1905.75	-95.71	-22.43	10.95	2.96
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	16.61	30.63	-21.48	7.36	32.28	-31.24	53.27	134.19	6.45	34.42



Dari tabel 2.4 dan tabel 2.5 tampak ada 2 (dua) program yang tidak bisa terlaksana sama sekali dari tahun awal renstra hingga akhir tahun pelaksanaan Renstra. Program tersebut adalah Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Dari tabel tersebut pula dapat terlihat bahwa pada 2017 pertumbuhan realisasi anggaran mengalami penurunan untuk beberapa program. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati antara lain:

1. Keterbatasan APBD sehingga lebih diutamakan program yang prioritas
2. Adanya hajatan politik di tahun 2017 sehingga ada pembatasan anggaran.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

##### **1. Tantangan**

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah:

- a) Meningkatnya produksi sektor kelautan dan perikanan;
- b) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penunjang UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- d) Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Pati;
- e) Terwujudnya pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif;
- f) Terwujudnya Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian;

- g) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses;
- h) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- i) Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan.

## 2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Ditetapkannya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai salah satu Dinas unggulan pembangunan lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. Adanya kebijakan Pemerintah (Permen KP No. 71) yang melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- c. Adanya undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang melindungi kelestarian mangrove;
- d. Adanya unit-unit pendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 8 TPI, 2 Tambak Dinas, 2 Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan 3 Balai Benih Ikan;
- e. Pembangunan Gudang Garam Kabupaten Pati yang berlokasi di Desa Raci Kecamatan Batangan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan;
- f. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat;
- g. Globalisasi perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional;
- h. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

- 1. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan masyarakat kelautan dan perikanan;
- 2. Pendampingan dan fasilitasi usaha bidang kelautan dan perikanan;

3. Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok-kelompok kelautan dan perikanan;
4. Sosialisasi regulasi tentang kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha bidang kelautan dan perikanan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan jasa unit pelaksana tugas Dinas Kelautan dan Perikanan baik itu Tempat Pelelangan Ikan maupun Balai Benih dan Budidaya Ikan Kabupaten Pati;
7. Pemberian rekomendasi ijin usaha bidang kelautan dan perikanan;
8. Kerjasama lintas sektor pelaksanaan patroli dalam rangka pengamanan sumberdaya kelautan.

Untuk mendukung jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2017-2022, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan untuk tahun pertama sebesar Rp 7.370.115.000,00, tahun ke 2 Rp. 25.350.178,00, tahun ke 3 Rp. 32.257.405.000, tahun ke 4 Rp. 35.355.313.000,00, tahun ke 5 Rp. 38.332.793,00 sehingga dalam kurun waktu lima tahun dana yang dibutuhkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 138.665.804.000,00 dengan Alokasi pendanaan 9,52% untuk program dan kegiatan administrasi perkantoran (EKS BAU), 88,10% untuk program dan kegiatan prioritas dan sisanya sebesar 2,38% untuk program dan kegiatan lainnya.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada table 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan	Belum optimalnya pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
2		Masih rendahnya produktivitas tangkap	Produksi garam belum optimal
3		Masih rendahnya produktivitas budidaya	Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan
4		Masih rendahnya produktivitas garam	Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan
5		Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah	Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
6			Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
7			Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham
8			Volume ikan yang dilelang di TPI belum optimal
9			Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas
10			Masih rendahnya kelompok pelaku utama perikanan yang sudah mencapai level pelaku utama perikanan madya
11			Belum optimalnya produksi olahan ikan
12			Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan

Yang menjadi masalah pokok dari pembangunan daerah khususnya sektor kelautan dan perikanan adalah pengembangan nilai tambah dari hasil kelautan dan perikanan. Kabupaten Pati memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar dengan pantai sepanjang ± 60 Km dan tambak seluas ± 10.329 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir serta sumberdaya perikanan air tawar yang semakin berkembang. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak sebanding dengan apa yang didapatkan, sehingga daya saing daerah disektor kelautan dan perikanan baik berupa produk mentah maupun produk olahan masih rendah dibanding sektor lainnya. Hal ini tidak terlepas dari produktivitas di sektor kelautan dan perikanan yang belum bisa optimal dan juga kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan masih sangat rendah.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.”

Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Kelautan dan Perikanan berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah :

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendukung dalam pencapaian misi yang ke enam yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. Perikanan termasuk salah satu poin penting yang tidak terlepas dari pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas perikanan diharapkan mampu untuk menaikkan daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Pati. Dalam hal mendukung pencapaian misi Kepala Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 2 (dua) program unggulan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati**

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<b>Misi 6</b> Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri	Produktivitas di sektor kelautan dan perikanan yang masih rendah baik itu produktivitas tangkap, budidaya maupun garam	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Banyaknya penduduk kawasan pesisir yang antusias untuk mendapatkan pembinaan pelatihan usaha sektor kelautan dan perikanan
			Kualitas produksi garam masih belum optimal	Peningkatan produksi Garam rakyat melalui pembinaan dan intorduksi teknologi pembuatan garam serta pemberian bantuan sarpras pengolahan garam melalui koperasi garam
			Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	Terbentuknya Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi sumberdaya kelautan
			Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan	Adanya kegiatan patroli laut yang melibatkan lintas sektoral dalam rangka pengawasan dan pembinaan kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap nelayan
			Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove	Adanya Penanaman mangrove oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dan pembinaan pelestarian ekosistem mangrove
			Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Adanya penyediaan bibit ikan unggul di UPTD Balai benih ikan dan budidaya, adanya sentra ikan nila salin di Kec. Tayu, adanya sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan dan lingkungan budidaya, adanya pendampingan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham	Dilaksanakannya sosialisasi hukum kenelayanan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dari segi kelembagaan serta pemberian bantuan kepada kelompok nelayan yang sudah berbadan hukum
			Pelayanan jasa pelelangan di TPI untuk mengoptimalkan volume ikan yang dilelang masih belum memadai	Pembangunan infrastuktur dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan, pembangunan kolam pelabuhan sebagai sentra industri perikanan tangkap serta penyediaan tenaga maupun sarana pendukung kegiatan pelelangan di TPI
			Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	Pembangunan infrastuktur dan pemeliharaan UPTD Balai Benih dan Budidaya (BBI dan tambak dinas)
		Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah	Sebagian kelas kelompok pelaku utama perikanan merupakan kelas kelompok pemula	Adanya pemberdayaan penyuluh baik swadaya maupun penyuluh pusat dalam membina kelompok pelaku utama perikanan
			Belum optimalnya produksi olahan ikan	Banyaknya pelaku usaha pengolahan ikan yang berminat untuk mendapatkan pelatihan diversifikasi olahan ikan, mulai bermunculan unit unit pengolahan ikan yang baru, serta adanya gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan (GEMARIKAN)
			Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan	Adanya sosialisasi dan fasilitasi lintas sektoral untuk pengajuan ijin usaha kelautan dan perikanan (SKP, PIRT, )

Dari penjelasan tersebut diatas, Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah Belum optimalnya pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan.



### **3.4. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**

#### **A. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti (Kedaulatan dalam politik, Berdikari dalam ekonomi, Kepribadian dalam kebudayaan). Dengan demikian, prinsip dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) *berdaulat*, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) *Mandiri*, yaitu berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) Berkepribadian dan berkebudayaan, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

## **VISI**

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden

untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **MISI**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

## **TUJUAN**

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

**Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

**Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

**Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

## **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni **“Kedaulatan”**, **“Keberlanjutan”**, dan **“Kesejahteraan”** dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

### **1. Stakeholders Prespective**

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

## **2. Customer Perspective**

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.

- g. Persentase peningkatan PNPB dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

### 3. **Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
  - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
  - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

### 4. **Learning and Growth Perspective (input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan

Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.

- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 khususnya sasaran strategis ketiga yaitu “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan dan Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk. Pada dasarnya indikator capaian untuk sasaran dari renstra KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan hampir sama bedanya untuk renstra KKP lebih menitikberatkan pada produksi sumberdaya kelautan dan perikanannya sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati lebih menitikberatkan pada produktivitasnya.

Capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

## **B. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai visi, yaitu :

**“Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”**

Untuk mewujudkan visi yang telah dijelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Misi :

**Misi ke-1:** Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan ketangguhan ekonomi masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan di Jawa Tengah melalui peningkatan kesejahteraan dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi.

**Misi ke-2:** Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

**Misi ke-3:** Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat Jawa Tengah melalui peningkatan produksi perikanan



tangkap dan perikanan budidaya dalam upaya mendukung kedaulatan pangan.

**Misi ke-4:** Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan upaya perbaikan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian guna memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

**Misi ke-5:** Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, berdaya saing serta memiliki nilai tambah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu, produk kelautan dan perikanan harus mampu bersaing dengan produk impor dan memperoleh posisi dalam pasar internasional.

**Misi ke-6:** Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

**Misi ke-7:** Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di 19 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dalam menunjang pelayanan terhadap nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar produk hasil perikanan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

**Misi ke-8:** Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk menjaga kelestarian dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang serta menghindari rusaknya sumberdaya laut dan perairan umum.

**Misi ke-9:** Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

Berdasarkan rumusan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 akan dirinci sebagai berikut:

**Tujuan :**

1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
2. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan
3. Meningkatkan kesejahteraan petani garam, taruna pesisir dan wanita pesisir
4. Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan
5. Meningkatkan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan
6. Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
7. Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan
8. Meningkatkan hasil perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
9. Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan penyuluh perikanan
10. Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan

11. Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan penyuluh perikanan
12. Meningkatkan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
13. Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
14. Mencegah kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
15. Meningkatkan peran masyarakat pengawas dlm kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
16. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya pendapatan nelayan
2. Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan
3. Meningkatnya pendapatan petani garam
4. Meningkatnya pendapatan taruna pesisir
5. Meningkatnya pendapatan wanita pesisir
6. Meningkatnya pengelolaan, dan penyelenggaraan di bidang keuangan, umum kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas
7. Tersedianya perencanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
9. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
10. Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah
11. Meningkatnya produk olahan hasil perikanan
12. Meningkatnya volume ekspor produk dan nilai ekspor produk hasil perikanan
13. Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI, ISO/IEC 17025. 2008 dan memiliki analis pengujian dan inspektur mutu yang memiliki standar kompetensi
14. Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, penyuluh perikanan dan KP3K

15. Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
16. Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Bidang Perikanan Budidaya
17. Terlaksananya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
18. Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
19. Terlaksananya pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
20. Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan dan Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk. Pada dasarnya indikator capaian untuk sasaran dari renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan hampir sama, bedanya untuk renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah lebih menitikberatkan pada produksi sumberdaya kelautan dan perikanannya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati lebih menitikberatkan pada produktivitasnya.

Dari telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dijabarkan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati seperti tertuang dalam tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Ditinjau Dari Sasaran**  
**Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
**Serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah**

No	Sasaran Strategis Renstra K/L dan Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<b>Sasaran I</b> Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terbilang masih rendah	Harga pakan ikan terlalu tinggi	Adanya kesadaran pembudidaya ikan untuk mulai membuat pakan ikan mandiri
			Masih kurangnya minat masyarakat mengonsumsi ikan	Adanya diversifikasi berbagai olahan ikan
			Harga perbekalan dan bahan bakar minyak yang tinggi	Program subsidi BBM untuk nelayan
2	<b>Sasaran II</b> Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM	Tingkat pendidikan SDM belum sesuai untuk tupoksi masing-masing dan persebaran ASN dari Badan Kepegawaian yang kurang merata	Banyaknya lulusan jurusan kelautan dan perikanan yang belum terserap penjarangan seleksi ASN
3	<b>Sasaran III</b> Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Masih belum optimalnya produksi sektor kelautan dan perikanan	Faktor cuaca dan alam yang tidak bisa diprediksi paling mendominasi dalam sektor kelautan dan perikanan	Potensi kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu melimpah
4	<b>Sasaran IV</b> Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah	Tingkat konsumsi makan ikan Kabupaten Pati terbilang rendah dilihat dari skala nasional	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengonsumsi ikan	Adanya promosi tentang gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan
5	<b>Sasaran V</b> Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Kerusakan eksisting lahan mangrove	Penebangan mangrove untuk pembuatan tambak	Penegakan hukum terkait pengrusakan mangrove
6	<b>Sasaran VI</b> Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI, ISO/IEC 17025.	Produk olahan ikan produksi unit pengolah ikan Kab. Pati masih banyak yang belum mempunyai sertifikat kelayakan pangan	Kurangnya kesadaran pelaku usaha pengolah hasil perikanan untuk membuat SKP	Koordinasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembuatan SKP kepada para pelaku usaha pengolah hasil perikanan

No	Sasaran Strategis Renstra K/L dan Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	2008 dan memiliki analis pengujian dan inspektur mutu yang memiliki standar kompetensi			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 1. Telaahan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Ada 9 kecamatan atau kawasan perkotaan di Kabupaten Pati yang telah disusun RDTR-nya. Namun beberapa diantaranya masih memerlukan revisi dan dilengkapi dengan peraturan zonasi. Selain rencana rinci tata ruang, diperlukan aturan turunan lainnya dari

RTRW Kabupaten Pati berupa Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati telah diatur rencana sistem perwilayahan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan yang terbagi ke dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati wajib memedomani aturan pemanfaatan ruang kaitannya dengan aktivitas pengembangan di bidang kelautan dan

perikanan. Perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan produksi kelautan dan perikanan perlu memahami tentang struktur ruang dan pola ruang yang telah diatur. Struktur ruang dalam penerapan kebijakan sektor kelautan perikanan erat kaitanya dengan konektivitas antar wilayah sebagai prasyarat untuk kemudahan mobilitas dan distribusi/penyaluran hasil produksi.

Program terkait dengan RTRW salah satunya adalah Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut yang salah satu kegiatannya ada penanaman mangrove. Ketentuan untuk kawasan mangrove menurut RTRW berisi:

- (1) Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau di sepanjang pesisir pantai meliputi:
  - a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar);
  - b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar);
  - c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 34 Ha (tiga puluh empat hektar);
  - d. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar);
  - e. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar).
  - f. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 54 Ha (lima puluh empat hektar); dan
  - g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 62 Ha (enam puluh dua hektar);
- (2) Arahan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui :
  - a. pelarangan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna;
  - b. pemindahan secara bertahap dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap kegiatan yang sudah ada, yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna; dan



- c. penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan yang rawan terhadap bahaya rob dan abrasi pantai.

Dalam perda RTRW diatur tentang Pengembangan sistem prasarana laut dimana pengembangan ini dilakukan melalui :

- a. pengembangan pelabuhan ikan dan fasilitas penambatan perahu nelayan untuk ukuran bobot sampai dengan 200 GT (dua ratus) gross ton;
- b. pengembangan pelabuhan niaga sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Kecamatan Juwana; dan
- c. pengembangan pelabuhan khusus sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri di Kecamatan Batangan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam 5 tahun ke depan berencana membangun kolam pelabuhan yang lokasinya berada di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana. Kawasan ini nantinya akan dijadikan sebagai sentra industri perikanan tangkap.

Program Pengembangan Budidaya juga diatur dalam perda RTRW antara lain :

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :
  - a. perikanan tangkap;
  - b. perikanan budidaya tambak;
  - c. perikanan budidaya air tawar; dan
  - d. pengolahan ikan.
- (2) Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan melalui :
  - a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil (nol sampai dengan tiga mil) dari pantai;
  - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil (tiga sampai dengan enam mil) dari garis pantai; dan
  - c. kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil (enam mil) garis pantai.
- (3) Rencana pengembangan perikanan budidaya tambak meliputi :

- a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 1.317 Ha (seribu tiga ratus tujuh belas hektar);
- b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 818 Ha (delapan ratus delapan belas hektar );
- c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 1.455 Ha (seribu empat ratus lima puluh lima hektar);
- d. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 1.167 Ha (seribu seratus enam puluh tujuh);
- e. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 769 Ha (tujuh ratus enam puluh sembilan hektar);
- f. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 3.087 Ha (tiga ribu delapan puluh tujuh hektar); dan
- g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 1.993 Ha (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hektar).

Untuk pengembangan budidaya perikanan fokus utama Dinas Kelautan dan perikanan adalah menjadikan Kecamatan Tayu sebagai sentra budidaya ikan nila salin. Ikan nila salin merupakan jenis ikan unggul yang dihasilkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Disebut nila salin, karena nila jenis ini tahan hidup pada air salinitas tinggi hingga 20 promil sehingga ikan ini layak dibudidayakan di tambak.

(4) Rencana pengembangan perikanan budidaya air tawar meliputi:

- a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar);
- b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 170 Ha (seratus tujuh puluh hektar);
- c. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 33 Ha (tiga puluh tiga hektar);
- d. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar); dan
- e. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar).

(5) Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kecamatan Dukuhseti;
  - b. Kecamatan Tayu;
  - c. Kecamatan Juwana; dan
  - d. Kecamatan Batangan.
- (6) Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan pembangunan minapolitan

## **2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam kaitannya dengan KLHS program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang langsung bersinggungan dengan lingkungan yaitu Program Perikanan Tangkap dengan indikasi kegiatan Pembangunan TPI, Pemeliharaan TPI, Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan, Pembangunan Turap Dermaga. Pembangunan dimaksudkan sebagai salah satu solusi pengendalian banjir dan upaya memperlancar lalu lintas kapal. Pembangunan di lokasi yang sesuai dengan kemampuan lahan dan tidak mengakibatkan alih fungsi lahan, berpotensi menghasilkan limbah dan peningkatan eksploitasi air, perlu memperhatikan kerawanan bencana.

alternatif mitigasi yang dilakukan yaitu pemberian pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau

meningkatkan fungsi ekosistem, dengan uraian mitigasi sebagai berikut:

1. Menghindari kawasan pesisir yang rawan bencana (sedimentasi dan abrasi)
2. Pengaturan mobilisasi alat dan bahan pembangunan sarpras pendukung TPI, kolam pelabuhan, dan turap dermaga
3. Perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sarana pendukung dermaga TPI
4. Reboisasi sekeliling prasarana dan sarana pendukung dermaga TPI

Rekomendasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan kajian KLHS adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan utama Pembangunan Kolam dan Turap Dermaga yang dilakukan terlebih dahulu yaitu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat (nelayan), yang disertai dengan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST), tempat pembuangan limbah ikan, melakukan sosialisasi/ pembinaan kepada masyarakat/ nelayan harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Sebagai langkah untuk konkrit melaksanakan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kurun waktu 5 tahun mendatang Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan sosialisasi pembangunan TPI dan Kolam Pelabuhan, rehabilitasi dan penanaman mangrove serta fasilitasi dan pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

### **3.5 Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Berikut review atas beberapa permasalahan terkait faktor-faktor pendorong maupun penghambat terhadap pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dari sudut pandang gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait, sasaran jangka menengah OPD provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

**Tabel 3.4**  
**Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
Gambaran pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas dan kuantitas produksi di sektor kelautan dan perikanan belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu Peningkatan produktivitas komoditas kelautan dan perikanan yang kurang optimal</li> </ul>
Sasaran jangka menengah kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terbilang masih rendah</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Masih belum optimalnya produksi sektor kelautan dan perikanan</li> <li>- Tingkat konsumsi makan ikan Kabupaten Pati terbilang rendah dilihat dari skala nasional</li> <li>- Produk olahan ikan produksi unit pengolah ikan Kab. Pati masih banyak yang belum mempunyai sertifikat kelayakan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang lamban</li> <li>- Isu Kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang kurang memadai</li> <li>- Isu Angka Konsumsi Makan Ikan kabupaten pati masih rendah</li> <li>- Isu Minimnya penjaminan mutu produk olahan pangan</li> </ul>
Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan yang rawan terhadap bahaya rob dan abrasi pantai</li> <li>- Rencana pengembangan budidaya tambak di wilayah 7 Kecamatan Pesisir</li> <li>- Pengembangan pelabuhan niaga sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Kecamatan Juwana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu kurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi</li> <li>- Isu penetapan Kecamatan Tayu sebagai sentra pembudidayaan ikan nila salin</li> <li>- Isu pengembangan kolam pelabuhan sebagai sentra industry perikanan tangkap</li> </ul>

<b>Review Aspek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Isu-isu</b>
Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD	Pembangunan TPI, Kolam Pelabuhan dan turap dermaga berpotensi menghasilkan limbah dan peningkatan eksploitasi air, perlu memperhatikan kerawanan bencana	- Isu Pembangunan insfrastuktur sektor kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan

Dari hasil review terhadap beberapa tinjauan aspek serta mengacu pada arus utama isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pati beserta lingkungan eksternal yang mempengaruhinya, maka diperoleh isu-isu strategis yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Isu Peningkatan produktivitas komoditas kelautan dan perikanan yang kurang optimal;
2. Isu Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang lamban;
3. Isu Kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang kurang memadai;
4. Isu Angka Konsumsi Makan Ikan kabupaten pati masih rendah;
5. Isu Minimnya penjaminan mutu produk olahan pangan;
6. Isu kurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi;
7. Isu penetapan Kecamatan Tayu sebagai sentra pembudidayaan ikan nila salin;
8. Isu pengembangan kolam pelabuhan sebagai sentra industry perikanan tangkap;
9. Isu Pembangunan insfrastuktur sektor kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah “Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator kinerja pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan yang merupakan pertumbuhan rata-rata dari komoditas unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu produktivitas tangkap, produktivitas budidaya dan produktivitas garam.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

1. Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai 3 indikator kinerja yaitu *Produktivitas tangkap* didapatkan dengan cara membandingkan hasil tangkapan ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah armada kapal yang menambatkan kapalnya di TPI, *produktivitas budidaya* diukur dengan cara membagi jumlah produksi budidaya total dengan luasan lahan budidaya ikan (tambak, kolam, sawah/ mina padi), dan *produktivitas garam rakyat* dihitung dengan membagi produksi garam rakyat selama musim produksi garam dengan luas lahan tambak garam.

2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai indikator kinerja pertumbuhan angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat konsumsi ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat per kapita penduduk selama satu tahun. Untuk perhitungannya angka konsumsi ikan ini dihitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari data SUSENAS.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati beserta target capaian kinerja selama 5 (lima) tahun dijabarkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan		Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	2.53	3.31	3.49	4.08	5.43
		Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	Produktivitas perikanan tangkap	13.16	13.21	13.27	13.39	13.53
			Produktivitas perikanan budidaya	3.9	3.9	3.91	3.92	3.93
			Produktivitas garam rakyat	74.54	81.5	89.45	99.39	114.3
		Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	4.45%	3.51%	3.49%	3.47%	3.71%



**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten pati, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi, misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dirumuskan sebagaimana tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI	: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik		
MISI 6	: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri		
Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan	1. Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	1. Memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan  2. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya	1. Pembangunan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan  2. Pendampingan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan  3. Pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sumberdaya kawasan perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	4. Peningkatan promosi konsumsi ikan 5. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung misi Bupati terpilih yang ke 6 (enam) yaitu “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri”.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merumuskan misi ke enam Bupati terpilih dalam satu tujuan dan 2 (dua) sasaran. Untuk sasaran Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan strateginya adalah :

1. Memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
2. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya.

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk strategi yang akan digunakan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Untuk menjalankan strategi tersebut diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur bidang kelautan dan perikanan
2. Pendampingan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan
3. Pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sumberdaya kawasan perikanan
4. Peningkatan promosi konsumsi ikan
5. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya daya saing daerah kelautan dan perikanan				Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	193.19%	2.53%		3.31%		3.49%		4.08%		5.53%		5.53%			
	Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan			Produktivitas perikanan tangkap	12.60	13.16		13.21		13.27		13.39		13.53		13.53			
				Produktivitas perikanan budidaya	3.92	3.90		3.90		3.91		3.92		3.93		3.93			
				Produktivitas garam rakyat	40.50	74.54		81.5		89.45		99.39		114.3		114.3			
		3.01.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	-5.27%	0.20%	75,000,000	0.30%	300,000,000	0.40%	416,387,000	0.50%	507,366,000	0.60%	577,205,000	0.60%	1,875,958,000		
				Produksi garam	16,868.50 ton	212,858.25 ton	-	232,725.02 ton		255,429.90 ton		283,811.00 ton		326,382.65 ton		326,382.65 ton			
		3.01.01.15.001	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah kelompok pesisir yang dibina	2 kelompok	4 kelompok	75,000,000	4 kelompok	125,000,000	5 kelompok	183,387,000	5 kelompok	191,000,000	6 kelompok	201,105,000	6 kelompok	775,492,000	DKP	7 Kec. Pesisir + 1 Desa Binaan P2MBG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.15.002	Pengembangan Usaha Garam Rakyat	Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina	120 petambak garam	0	-	140 petambak garam	175,000,000	160 petambak garam	233,000,000	180 petambak garam	316,366,000	200 petambak garam	376,100,000	200 petambak garam	1,100,466,000	DKP	Kec. Juwana, Kec. Batangan, Kec. Wedarijaksa, Kec. Trangkil
		3.01.01.16	Program Pemberdayaa n masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	-33.33%	6.25%	25,000,000	6.67%	150,000,000	7.14%	166,387,000	7.69%	182,366,000	8.33%	202,203,000	8.33%	725,956,000		
		3.01.01.16.001	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan	Jumlah POKMASWA S yang terbentuk	0 Pokmaswa s	1 Pokmasw as	25,000,000	1 Pokmaswa s	150,000,000	1 Pokmasw as	166,387,000	1 Pokmasw as	182,366,000	1 Pokmasw as	202,203,000	5 Pokmasw as	725,956,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayaguna an Sumberdaya Laut	Peningkata n penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0%	0.09%	50,000,000	0.09%	150,264,000	0.09%	170,950,000	0.18%	196,972,000	0.26%	229,255,000	0.26%	797,441,000		
		3.01.01.17.001	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaa n Sumberdaya Laut	Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun	650 km	1050 km	50,000,000	1200 km	150,264,000	1200 km	170,950,000	1500 km	196,972,000	1500 km	229,255,000	1500 km	797,441,000	DKP	7 Kec. Pesisir

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.18	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Luasan eksisting lahan mangrove	173.20 Ha	176.88 Ha	147,000,000	180.43 Ha	460,398,000	185.77 Ha	506,427,000	192.11 Ha	545,458,000	199.98 Ha	593,934,000	199.98 Ha	2,253,217,000		
		3.01.01.18.001	Kajian Peningkatan Mitigasi Bencana	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana	-	-	-	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	600,000,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.18.004	Pengembangan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah mangrove yang ditanam	0	15.680 batang	147,000,000	30.000 batang	310,398,000	31.000 batang	356,427,000	32.000 batang	395,458,000	33.000 batang	443,934,000	33.000 batang	1,653,217,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Pertumbuhan produksi garam	-95.56	7%	45,000,000	NIHIL								7%	45,000,000		
		3.01.01.19.001	Penyuluhan Budaya Kelautan	Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina	120 petambak garam	120 petambak garam	45,000,000									120 petambak garam	45,000,000	DKP	Kec. Juwana, Kec. Batangan, Kec. Wedarijaksa, Kec. Trangkil
		3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya	42,036 ton	42,290 ton	731,500,000	42,400 ton	2,500,000,000	42,515 ton	2,773,124,000	42,640 ton	3,039,447,000	42,775 ton	3,370,068,000	42,775 ton	12,414,139,000		
				udang windu	1,025 ton	755		760		770		775		780		780			
				bandeng	28,360 ton	28,040		28,050		28,060		28,080		28,100		28,100			
				nila salin	486 ton	550		600		650		665		710		710			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<b>lele</b>	<b>10,272 ton</b>	<b>11,510</b>		<b>11,530</b>		<b>11,550</b>		<b>11,600</b>		<b>11,650</b>		<b>11,650</b>			
				<b>ikan lain</b>	<b>1,893 ton</b>	<b>1,435</b>		<b>1,460</b>		<b>1,485</b>		<b>1,520</b>		<b>1,535</b>		<b>1,535</b>			
		3.01.01.20.001	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul	1,200 ekor	1,600 ekor	520,000,000	4,000 ekor	700,000,000	4,000 ekor	775,000,000	4,000 ekor	850,000,000	4,000 ekor	930,068,000	4,000 ekor	3,775,068,000	DKP	5 BBBI
		3.01.01.20.002	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	500 Pembudidaya	600 Pembudidaya	107,500,000	700 Pembudidaya	650,000,000	800 Pembudidaya	560,000,000	900 Pembudidaya	590,000,000	1,000 Pembudidaya	675,000,000	1,000 Pembudidaya	2,582,500,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.20.003	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	-	150 pembudidaya	104,000,000	600 pembudidaya	700,000,000	650 pembudidaya	780,124,000	700 pembudidaya	789,447,000	750 pembudidaya	830,000,000	750 pembudidaya	3,203,571,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.20.004	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ikan	Jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan	-	-	-	1,000 Pembudidaya	300,000,000	1,050 Pembudidaya	500,000,000	1,100 Pembudidaya	650,000,000	1,150 Pembudidaya	770,000,000	1,150 Pembudidaya	2,220,000,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.20.005	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Budidaya	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pemanfaatan prasarana budidaya	-	-	-	500 Pembudidaya	150,000,000	525 Pembudidaya	158,000,000	550 Pembudidaya	160,000,000	600 Pembudidaya	165,000,000	600 Pembudidaya	633,000,000	DKP	Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kementerian	175.00%	23.08%	3,996,500,000	25.00%	14,300,000,000	25%	20,000,000,000	28.00%	21,920,742,000	28.13%	23,436,853,000	28.13%	83,654,095,000		
				Volume ikan yang dilelang di TPI	27,782 ton	28,004.67 ton		28,228.71 ton		28,511.00 ton		28,853.13 ton		29,228.22 ton		29,228.22 ton			
		3.01.01.21.001	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang dibina	12 KUB	12 KUB	255,000,000	14 KUB	370,800,000	15 KUB	400,000,000	17 KUB	450,000,000	20 KUB	710,000,000	20 KUB	2,185,800,000	DKP	7 kec. Pesisir
		3.01.01.21.002	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang dibangun	1 TPI	1 TPI	185,945,000	0	-	1 TPI	1,250,000,000	1 TPI	1,150,000,000	-	-	-	2,585,945,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.003	Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab	1 TPI	1 TPI	355,555,000	2 TPI	1,129,200,000	2 TPI		1 TPI	970,742,000	2 TPI	1,476,853,000	8 TPI	5,232,350,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.21.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah rehab sedang/berat TPI	1 TPI	1 TPI	200,000,000	NIHIL								1 TPI	200,000,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.21.005	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Jumlah retribusi TPI	Rp. 6 Milyar	Rp. 6.7 Milyar	3,000,000,000	Rp. 6.7 Milyar	3,200,000,000	Rp. 6.8 Milyar	3,400,000,000	Rp. 6.9 Milyar	3,600,000,000	Rp. 7 Milyar	3,800,000,000	Rp. 7 Milyar	17,000,000,000	DKP	8 TPI



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.21.006	Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan	Prosentase pembangunan kolam pelabuhan/ tempat tambat kapal nelayan	0%	0%	-	15%	9,000,000,000	20%	12,800,000,000	30%	14,900,000,000	35%	17,000,000,000	100%	53,700,000,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.007	Normalisasi Alur Pelayaran TPI	Jumlah Lokasi normalisasi alur pelayaran TPI	0	0	-	2 lokasi	200,000,000	2 lokasi	400,000,000	2 lokasi	250,000,000	2 lokasi	200,000,000	8 lokasi	1,050,000,000	DKP	7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.008	Pengelolaan Sarana TPI	Prosentase pengelolaan sarana TPI	0%	0%	-	10%	400,000,000	10%	200,000,000	20%	350,000,000	20%	250,000,000	60%	1,200,000,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.21.009	Pembangunan Turap Dermaga	Prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI	0%	0%	-	0%	-	15%	250,000,000	15%	250,000,000	0%	-	30%	500,000,000	DKP	8 TPI
		3.01.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Pertumbuhan luasan kawasan perikanan budidaya	63.73%	0,018%	225,000,000	0,019	2,400,000,000	0,020	2,662,199,000	0,021	2,917,869,000	0,022	3,235,265,000	0,022	11,440,333,000		
		3.01.01.24.001	Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah daerah yang disurvei	21 kecamatan	21 kecamatan	225,000,000	21 kecamatan	250,000,000	21 kecamatan	150,000,000	21 kecamatan	150,000,000	21 kecamatan	260,000,000	21 kecamatan	1,035,000,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.24.016	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut dan Air Payau	Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau	-	-	-	10%	950,000,000	15%	1,012,199,000	25%	1,067,869,000	25%	1,475,265,000	75%	4,505,333,000	DKP	Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						2018		2019		2020		2021		2022		Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.24.017	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar	-	-	-	10%	1,200,000,000	10%	1,500,000,000	15%	1,700,000,000	15%	1,500,000,000	50%	5,900,000,000	DKP	Kab. Pati
	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk			Pertumbuhan angka konsumsi ikan	3.16%	4.45%		3.51%		3.49%		3.47%		3.71%		3.71%			
		3.01.01.22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	4.82%	5.52%	50,000,000	6.19%	300,000,000	6.40%	332,775,000	6.67%	364,734,000	7.18%	404,409,000	7.18%	1,451,918,000		
		3.01.01.22.001	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih	50 Penyuluh	50 Penyuluh	50,000,000	55 Penyuluh	300,000,000	55 Penyuluh	332,775,000	60 Penyuluh	364,734,000	60 Penyuluh	404,409,000	60 Penyuluh	1,451,918,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan ikan	41,465.55 ton	41,881.24 ton	97,000,000	42,090.64 ton	2,350,000,000	42,301.10 ton	2,523,124,000	42,512.60 ton	2,714,447,000	42,725.17 ton	2,995,068,000	42,725.17 ton	10,679,639,000		
				Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	0.00%	6.80%		7.20%		7.50%		8.30%		8.70%		8.70%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.23.001	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah daerah yang disurvei	21 dokumen	21 dokumen	20,000,000	21 dokumen	650,000,000	21 dokumen	700,000,000	21 dokumen	750,000,000	21 dokumen	780,000,000	21 dokumen	2,900,000,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.23.026	Pengembanga n Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekka n	3 resep	4 resep	77,000,000	5 resep	1,550,000,000	6 resep	1,623,124,000	7 resep	1,664,447,000	8 resep	1,815,068,000	8 resep	6,729,639,000	DKP	Kab. Pati
		3.01.01.23.027	Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan	-	-	-	8 pelaku usaha	150,000,000	8 pelaku usaha	200,000,000	9 pelaku usaha	300,000,000	9 pelaku usaha	400,000,000	9 pelaku usaha	1,050,000,000	DKP	Kab. Pati
Non Urusan																			
		3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100.00%	100.00%	1,365,495,000	100.00%	1,707,661,000	100.00%	1,894,222,000	100.00%	2,076,138,000	100.00%	2,301,973,000	100.00%	9,345,489,000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	300 surat	1000 surat	4,800,000	1050 surat	6,000,000	1100 surat	7,500,000	1150 surat	9,000,000	1200 surat	11,000,000	1200 surat	38,300,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						2018		2019		2020		2021		2022		Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Pembayaran Pajak	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	14 rekening	14 rekening	122,000,000	14 rekening	130,700,000	14 rekening	143,580,000	14 rekening	152,259,000	14 rekening	171,872,000	14 rekening	720,411,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS/Non PNS yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan selama setahun.	20 polis asuransi kesehatan	16 polis asuransi kesehatan	9,792,000	17 polis asuransi kesehatan	11,220,000	18 polis asuransi kesehatan	12,960,000	19 polis asuransi kesehatan	14,820,000	20 polis asuransi kesehatan	16,800,000	20 polis asuransi kesehatan	65,592,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun.	64 kendaraan dinas	64 kendaraan dinas	20,900,000	65 kendaraan dinas	25,850,000	67 kendaraan dinas	29,640,000	68 kendaraan dinas	33,700,000	68 kendaraan dinas	40,200,000	68 kendaraan dinas	150,290,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun.	17,748 m2	17,748 m2	52,400,000	17,748 m2	65,000,000	17,748 m2	73,500,000	17,748 m2	75,200,000	17,748 m2	77,980,000	17,748 m2	344,080,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun.	69 unit	89 unit	32,499,000	92 unit	45,880,000	94 unit	50,450,000	96 unit	57,458,000	98 unit	74,778,000	98 unit	261,065,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah komulatif alat tulis kantor yang disediakan selama setahun.	2,402 unit	2,568 unit	17,658,000	2,623 unit	27,500,000	2,654 unit	31,192,000	2,685 unit	39,600,000	2,712 unit	46,500,000	2,712 unit	162,450,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
					Awal Perencana-an 2017	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar komulatif barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	41,491 Lembar	41,528 lembar	16,559,000	41,620 lembar	22,240,000	41,640 lembar	26,600,000	41,660 lembar	33,000,000	41,680 lembar	40,260,000	41,680 lembar	138,659,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	158 unit	110 unit	7,783,000	115 unit	9,600,000	120 unit	12,250,000	125 unit	16,200,000	130 unit	19,760,000	130 unit	65,593,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	-	31 unit	87,804,000	10 unit	112,447,000	14 unit	144,290,000	17 unit	152,800,000	20 unit	168,483,000	20 unit	665,824,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	54 eksemplar	88 eksemplar	9,544,000	90 eksemplar	12,600,000	92 eksemplar	14,500,000	94 eksemplar	17,600,000	96 eksemplar	23,100,000	96 eksemplar	77,344,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah komulatif bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun.	-	24,480 unit	206,640,000	46.080 unit	392,680,000	46,680 unit	420,120,000	47,280 unit	490,800,000	47,280 unit	502,440,000	47,280 unit	2,012,680,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun.	3,427 Porsi	5,025 Porsi	84,830,000	5,035 Porsi	90,340,000	5,045 Porsi	97,500,000	5,050 Porsi	101,900,000	5,060 Porsi	109,660,000	5,060 Porsi	484,230,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	1,843 Kali	2,041 Kali	300,010,000	2,048 kali	317,454,000	2,054 kali	334,500,000	2,061 kali	338,301,000	2,075 kali	376,870,000	2,075 kali	1,667,135,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun.	20 orang	16 orang	244,800,000	17 orang	275,400,000	18 orang	311,040,000	19 orang	342,000,000	20 orang	396,000,000	20 orang	1,569,240,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.020	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun.	43 paket pekerjaan	45 paket pekerjaan	60,000,000	48 paket pekerjaan	70,500,000	50 paket pekerjaan	82,000,000	52 paket pekerjaan	93,000,000	54 paket pekerjaan	110,400,000	54 paket pekerjaan	415,900,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.022	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang disediakan selama setahun.	10 orang	11 orang	87,476,000	11 orang	92,250,000	11 orang	102,600,000	11 orang	108,500,000	11 orang	115,870,000	11 orang	506,696,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	415,735,000	100%	532,918,000	100%	580,206,000	100%	625,182,000	100%	689,708,000	100%	2,843,749,000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan selama setahun.	-	1 unit	20,000,000	2 unit	40,000,000	1 unit	25,000,000	-	-	2 unit	60,000,000	2 unit	145,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun.	-	3 unit	180,700,000	2 unit	204,100,000	3 unit	211,800,000	3 unit	240,200,000	4 unit	250,000,000	4 unit	1,086,800,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun.	-	3 unit	19,745,000	5 unit	40,000,000		-	2 unit	25,000,000		-		84,745,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun.	-	19 unit	43,545,000	5 unit	59,418,000	7 unit	86,906,000	8 unit	98,732,000	9 unit	105,300,000	9 unit	393,901,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaa n rutin/ berkala gedung kantor selama setahun.	817 m2	523 m2	61,745,000	817 m2	65,900,000	817 m2	99,500,000	817 m2	100,750,000	817 m2	103,000,000	817 m2	430,895,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaa n rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional selama setahun.	64 unit	64 unit	90,000,000	65 unit	123,500,000	67 unit	157,000,000	68 unit	160,500,000	68 unit	171,408,000	68 unit	702,408,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Kedisiplina n aparatur dalam berseragam dan kehadiran	100	100	39,600,000	100	48,790,000	100	54,120,000	100	59,318,000	100	65,770,000	100	267,598,000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas/ olahraga/ hari-hari tertentu beserta perlengkapan nya yang diadakan selama setahun	0	-	-	120 stel	40,790,000	125 stel	44,120,000	130 stel	47,318,000	140 stel	51,770,000	140 stel	223,598,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakaian batik minatan yang diadakan selama setahun	0	120 stel	39,600,000	NIHIL								120 stel	39,600,000	DKP	DKP Kab. Pati



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.03.006	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan e-Presensi pegawai yg diadakan selama setahun	0	-	-	12 laporan	8,000,000	12 laporan	10,000,000	12 laporan	12,000,000	12 laporan	14,000,000	12 laporan	44,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase meningkatn ya kapasitas sumberdaya aparatur	100	100	10,000,000	100	24,395,000	100	27,060,000	100	29,659,000	100	32,885,000	100	123,999,000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengimplem entasikan peraturan perundang-undangan tentang pejabat pengadaan dan Tim Pengelola Sistem Teknologi Informasi Online selama setahun.	3 orang	2 orang	10,000,000	15 orang	24,395,000	15 orang	27,060,000	17 orang	29,659,000	17 orang	32,885,000	17 orang	123,999,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketertiban pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	97,285,000	100	125,752,000	100	150,424,000	100	175,615,000	100	198,197,000	100	747,273,000		DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						2018		2019		2020		2021		2022		Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	5 laporan	5 laporan	21,000,000	5 laporan	23,000,000	5 laporan	23,000,000	5 laporan	30,000,000	5 laporan	28,000,000	5 laporan	125,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.004	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1 laporan	13,000,000	1 laporan	14,000,000	1 laporan	14,000,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	76,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.005	Penyusunan Renja PD	Jumlah dokumen dokumen rencana kerja (RENJA) SKPD yang disusun selama setahun	3 dokumen	2 dokumen	21,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	35,000,000	2 dokumen	35,000,000	2 dokumen	141,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.006	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran	4 dokumen	4 dokumen	21,000,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	25,000,000	4 dokumen	35,000,000	4 dokumen	35,000,000	4 dokumen	141,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.007	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan PD	Jumlah laporan perkembangan kegiatan SKPD yang disusun selama setahun	12 laporan	12 laporan	21,285,000	12 laporan	23,752,000	12 laporan	23,424,000	12 laporan	30,615,000	12 laporan	30,197,000	12 laporan	129,273,000	DKP	DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.06.009	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja PD	Jumlah laporan evaluasi Rencana Kinerja PD selama 1 tahun	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	75,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.010	Penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD)	Jumlah dokumen Renstra/ Renstra perubahan yang disusun selama 1 tahun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	25,000,000	-	-	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	60,000,000	DKP	DKP Kab. Pati
TOTAL							7,370,115,000		25,350,178,000		32,257,405,000		35,355,313,000		38,332,793,000		138,665,804,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

No.	Misi/ Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Misi VI : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri							
I	Indikator Tujuan :							
	Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	193.19%	2.53	3.31	3.49	4.08	5.43	5.43
II	Indikator Sasaran :							
	Produktivitas perikanan tangkap	12.6	13.16	13.21	13.27	13.39	13.53	13.53
	Produktivitas perikanan budidaya	3.92	3.9	3.9	3.91	3.92	3.93	3.93
	Produktivitas garam rakyat	40.5	74.54	81.5	89.45	99.39	114.3	114.3
	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	3.16%	4.45%	3.51%	3.49%	3.47%	3.71%	3.71%
III	Indikator Program							
	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	0.20%	0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.60%	0.60%
	Produksi garam	115,638.86 ton	212,858.25 ton	232,725.02 ton	255,429.90 ton	283,811.00 ton	326,382.65 ton	326,382.65 ton
	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	-33.33%	6.25%	6.67%	7.14%	7.69%	8.33%	8.33%

No.	Misi/ Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0%	0.09%	0.09%	0.09%	0.18%	0.26%	0.26%
	Luasan eksisting lahan mangrove	173.20 Ha	176.88 Ha	180.43 Ha	185.77 Ha	192.11 Ha	199.98 Ha	199.98 Ha
	Pertumbuhan produksi garam	-95.56	7%	NIHIL				7.00%
	produksi perikanan budidaya	42,036 ton	42,290 ton	42,400 ton	42,515 ton	42,640 ton	42,775 ton	42,775 ton
	<i>udang windu</i>	1,025 ton	755	760	770	775	780	780
	<i>bandeng</i>	28,360 ton	28,040	28,050	28,060	28,080	28,100	28,100
	<i>nila salin</i>	486 ton	550	600	650	665	710	710
	<i>lele</i>	10,272 ton	11,510	11,530	11,550	11,600	11,650	11,650
	<i>ikan lain</i>	1,893 ton	1,435	1,460	1,485	1,520	1,535	1,535
	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	175.00%	23.08%	25.00%	25%	28.00%	28.13%	28.13%
	Volume ikan yang dilelang di TPI	27,782 ton	28,004.67 ton	28,228.71 ton	28,511.00 ton	28,853.13 ton	29,228.22 ton	29,228.22 ton
	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	63.73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	4.82%	5.52%	6.19%	6.40%	6.67%	7.18%	7.18%
	Produksi olahan ikan	41,465.55 ton	41,881.24 ton	42,090.64 ton	42,301.10 ton	42,512.60 ton	42,725.17 ton	42,725.17 ton
	Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	0.00%	6.80%	7.20%	7.50%	8.30%	8.70%	8.70%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Disamping itu Renstra menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini juga memberikan landasan kebijakan operasional bagi Sekretariat, seluruh Bidang dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Renstra ini menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang kelautan dan perikanan, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjawab isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Masa berlaku Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Pati. Apabila terjadi perubahan keijakan, maka Renstra dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana perubahan kebijakan dimaksud.

Demikian Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati lima tahun ke depan.

BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO

